

GERAKAN PEMBEBASAN ISLAM PATANI DI THAILAND SELATAN: Studi atas *Patani United Liberation Organization (PULO)*, 1968-1993

Oleh:

Jamaludin

(juddin3377@gmail.com)

Helen Sabera Adib

*Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah*

Abstract:

Assimilation policy of the Thai government that wants to establish the Kingdom of Siam Kingdom have led to a conflict. The government's policy intends to mengsimilasi Patani Malay-Thai-Buddha in terms of religion and culture have led to a resistance and the movement of the Patani Malay-Muslim majority. Cultural and religious differences between Thai Buddhists and Malay-Muslim Patani it is one factor that drives the desire-Patani Malays of Patani Raya founded by an autonomous region. However, this desire raises the ongoing conflict between the two ethnic groups. That's why groups were emerging resistance among Patani Malay Muslim community against the Thai government that is culturally synonymous with Buddhism. One insurgent was Patani United Liberation Organization (PULO), established in 1968.

Keywords: -PULO, -Pattani-Malay, -politics conflict

Pendahuluan

Pada tahun 1932 M, timbul revolusi di Siam/Thailand di mana sistem monarki absolut Thailand berganti menjadi sistem monarki parlementer yang keanggotaannya didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Puncaknya pada masa pemerintahan Phibul Songkran ketika dia mengganti nama negara dari Kerajaan Siam menjadi kerajaan Thailand pada tahun 1939 M.¹ Penggantian nama tersebut tidak hanya terhadap nama kerajaan melainkan juga berimplikasi pada penyeragaman etnis dan bahasa, menjadi etnis dan bahasa yang unggul yaitu etnis dan bahasa Thai. Pergantian tersebut menjadi lebih mencemaskan lagi, karena mengancam penghapusan identitas Melayu maupun identitas Islam secara tuntas dengan keluarnya *Ratthaniyom* No. 3 yang berlakunya pada tanggal 2 Agustus 1939 yang isinya antara lain:

¹Syahbuddin Mangandaralam, *Thailand Negara Gajah Putih* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h.19

Karena pemerintah memandang bahwa nama-nama yang digunakan oleh warga Thai di beberapa bagian negara ini tidak sesuai dengan nama ras dan acuan penduduknya, dan bahkan rakyat Thai Utara, Thai Timur Laut, Thai Selatan, Thai Islam, tidak sesuai, karena (Muangthai) adalah satu dan tidak bisa dibagi-bagi. Karena itu, pemerintah memberitahukan bahwa Keputusan Negara adalah sebagai berikut:

- 1. Warga Thai jangan memberi nama bertentangan dengan nama ras yang menjadi acuannya,*
- 2. Menggunakan kata “Thai” untuk semua warga Thai tanpa pembagian apa pun seperti yang telah disebutkan di atas.²*

Pergantian sistem pemerintahan tersebut lantas diikuti dengan semakin radikalnya kebijakan pemerintah pusat Thailand terhadap wilayah-wilayah di Thailand Selatan. Jika di era monarki absolut orang-orang Melayu lokal masih memiliki perwakilan di badan pemerintahan Thailand Selatan, maka di era monarki konstitusional sistem perwakilan daerah tersebut dihapuskan dan diganti menjadi sistem yang lebih sentralistik.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Thailand yang baru tidak hanya sampai di situ. Peraturan-peraturan lokal berbasis Islam juga dihapuskan dan masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai - menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Hal tersebut pada gilirannya menimbulkan masalah baru bagi penduduk Thailand Selatan yang tidak fasih berbahasa Thailand karena peluang mereka mendapatkan pekerjaan jadi menipis. Dalam suasana semacam ini, golongan Muslim Melayu merasa bahwa mereka dijauhkan dari segala kesempatan untuk menerima pendidikan atau memegang posisi-posisi tinggi dalam birokrasi.³

Namun demikian, bagi wilayah selatan, persoalan perbedaan agama menjadi salah satu faktor pemicu muncul dan menguatnya perlawanan. Hal ini tidak lepas dari penerapan kebijakan negara Thailand yang menyangkut penerapan kebijakan nasionalisme Thailand khususnya pada masa pemerintahan Phibul Songkram, di mana berusaha menerapkan konsep ultra *chauvinistic* yang menempatkan budaya Thai lebih tinggi dibandingkan dengan budaya lain yang memberikan efek jangka panjang bagi kelangsungan masyarakat Thailand yang multikultur, seperti banyak kasus yang

²Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 302

³*Ibid.*, h.258

menjadi contoh perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kalangan Muslim khususnya di Selatan, baik dalam bahasa, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.⁴

Menurut M. Abdul Karim di buku *Sejarah dan Pemikiran Peradaban Islam* dikatakan:

*Saat ini masih ada umat Islam yang berharap mendapatkan otonomi sendiri, atau paling tidak menjadi penguasa atas masyarakat mereka sendiri. Mereka itu adalah penduduk minoritas muslim dalam negara-negara nasional, misalnya Kashmir di India, Moro di Filipina, Patani di Thailand, Cesnia, Kazana, Cremia—Federasi Rusia dan negara-negara Islam mayoritas di semenanjung Balkan. Alasannya menuntut kebebasan dan kemerdekaan itu adalah karena status sebagai minoritas seringkali mendapat kesulitan dalam memperoleh kesejahteraan hidup dan kebebasan dalam menjalankan agama mereka.*⁵

Kutipan di atas menjelaskan kesadaran nasionalisme hampir di semua negeri muslim yang menginginkan suatu negara yang berdaulat. Persoalan masyarakat muslim Patani yang ingin memisahkan diri sangat meresahkan pemerintah Thailand. Gerakan pemberontakan kaum separatis Melayu muslim melahirkan sejumlah organisasi.⁶ Kelompok-kelompok yang beragam dari organisasi separatis mengaku beroperasi di provinsi-provinsi Melayu Thailand Selatan.

Kelompok tertua adalah Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP), yang didirikan oleh seorang aristokrat Melayu. Barisan ini adalah kelompok Islam konservatif, dan dipercaya punya hubungan yang dekat dengan partai Islam se-Malaysia (PAS), yang pernah berkuasa di negara tetangga Kelantan. Namun, BNPP telah menjadi kurang aktif pada akhir dasawarsa 1970-an, Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang didirikan oleh seorang guru agama, punya suatu sikap yang didasarkan pada ajaran kiri. Karena diduga beraliansi dengan Partai Komunis.⁷

Walaupun BRN cukup berhasil mengusik stabilitas di Thailand selatan lewat aksi-aksi bersenjatanya, kelompok tersebut tidak pernah berkembang menjadi ancaman regional yang serius karena minimnya dukungan dari rakyat Thailand selatan sendiri -

⁴Paulus Rudolf Yuniarto”, Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 7, No. 1 tahun 2005

⁵M. Abdul Karim, *Sejarah dan Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2012), h. 359

⁶Ajid Thohir, *Studi Kawasan dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 360

⁷Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 333-334

khususnya dari kalangan Muslim konservatif - yang merasa tidak cocok & tidak tertarik dengan ideologi sayap kiri yang diusung BRN. Buntutnya di tahun 1968 M, sejumlah orang Thailand selatan yang merasa bahwa aksi-aksi perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat terlalu minim lalu membentuk kelompok pemberontak baru yang bernama Patani United Liberation Organization (PULO: Organisasi Pembebasan Bersatu Patani) sebagai jalan tengah dari kedua organisasi BNPP dan BRN.⁸

Organisasi *Patani United Liberation Organization* (PULO) atau Pertumbuhan Persatuan Pembebasan Patani (PPPP) Organisasi ini dibentuk di luar negeri pada 22 Januari 1968 M yang dipimpin oleh Tengku Bira.⁹ Salah satu hal yang menyebabkan organisasi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat massa dan jaringan dunia luar, karena terdiri dari cendekiawan muda. Pendirian ini lengkap tersusun meliputi, politik, ekonomi, keagamaan, seksi agama dan hal ihwal negeri di bawah pimpinan setia usaha Agungnya Tengku Bira Kotanila atau Kadir Abdul Rahman, serjana sains politik dari universitas di India. Namun, beliau aktif dalam berperan perhubungan dunia internasional; Malaysia, Arabia, Syiria dan Libya, untuk membawa aspirasi umat Melayu Patani, serta mendapat simpati, dukungan oleh dunia Internasional.¹⁰

Metodologi

Kajian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik sebagai alat analisis. Sosiologi politik adalah upaya untuk memahami dan campur tangan ke dalam hubungan yang selalu berubah antara sosial dan politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Pengertian tersebut pada dasarnya membedakan pemerintah dengan yang diperintah.¹¹

⁸Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 178

⁹Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, h. 275.

¹⁰S. Yunanto, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara* (Jakarta: Fried Ebert Stiftung, 2003), h. 206

¹¹Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 26.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi politik yang data-datanya dikumpulkan dari kepustakaan (*Library research*) yang berupa dokumen, literatur, jurnal, artikel, dan hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, pertama terdapat sumber sejarah primer (*primer sources*) dan kedua sumber sejarah sekunder (*secondary sources*).

Di dalam kajian ini, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk mempermudah dalam usaha penelitian, yaitu: *heuristik*, *kritik sumber*, *interpretasi*, dan *histiografi*. [1] Heuristik atau pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber atau jejak sejarah. [2] *Verifikasi* (kritik sumber) bertujuan untuk menguji kebenaran dan keabsahan sumber. Untuk mengkritik suatu sumber, dibagi menjadi dua cara, yaitu kritik intern dan kritik eksternal. [3] Interpretasi (penafsiran). [4] Analisis sejarah sering disebut juga dengan interpretasi sejarah. Dalam tahap interpretasi ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu: analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode utama dan interpretasi. Yang terakhir [4] historiografi (penulisan sejarah). Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan, layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan).

Pembahasan

Pada awal kemunculan PULO pada masa pemerintah Phibul hanya dipandang sebagai bandit biasa namun akhirnya pada tahun 1948 M, Phibul menyadari bahwa gerakan-gerakan separatis yang berkembang ternyata adalah pemberontakan lokal. Pada tahun ini, Phibul menyatakan perang terhadap terorisme dan memberlakukan hukum darurat

¹²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34-35

militer (*Martial Law*) di wilayah basis Muslim Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Dampaknya, Thailand Selatan menjadi kancah konflik dan perang antara muslim Patani dengan pemerintah, dan dengan komunitas Buddhis Thai.¹³

Tak kurang dari 5.473 korban tewas dan 9.693 orang terluka korban dari sekitar 843 peristiwa yang terjadi. Di tengah-tengah suasana kacau balau itu, bekumandanglah Adzan dan kalimah syahadah. Keesokan harinya, para ulama menyatakan semua orang tewas itu sebagai *syahid* (martir). Sekarang situasinya sudah datang bagi orang-orang Melayu-Muslim untuk melancarkan perang suci (*Jihad*) terhadap apa yang mereka anggap musuh mereka. Suasana itu dilukiskan dengan baik oleh Suthasat:

Mereka yang mati Syahid itu harus diperlakukan secara khusus. Jenazah mereka tidak perlu dimandikan atau dibungkus (kain kafan) seperti yang diharuskan bagi jenazah biasa. Yang perlu dicatat adalah bahwa inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah golongan Melayu Muslim di Thai Selatan bahwa mereka mempunyai syuhada sendiri pernyataan (para ulama) yang dikeluarkan dengan suara bulat itu meyakinkan rakyat tentang kesucian orang-orang yang mati itu, dan mereka mempersiapkan diri untuk berkorban dengan cara yang sama. mereka tidak takut sedikit pun, sebab mereka akan bangkit kembali setela mati. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa mereka yang masih saja merasa enggan untuk ikut dalam demonstrasi, berbuat dosa besar.¹⁴

Dalam kasus golongan Melayu-Muslim di Thailand Selatan, ada tiga faktor yang menarik perhatian internasional kepada personal mereka. *Pertama*, dengan sendirinya, adalah afinitas etnis antara mereka dan hampir 200 juta jiwa rakyat ras Melayu Asia tenggara. Sejak pergantian abad yang silam, para pemimpin politik di Indonesia dan Malaysia merasa prihatin dengan situasi saudara-saudara yang belum dibebaskan dari kekuasaan Thai. *Kedua*, ikatan Islam yang menghubungkan golongan minoritas Melayu ini dengan dunia Islam, *ketiga*, kepentingan ideologis negara lain yang berharap untuk memperoleh sekutu dari kalangan berbagai kelompok gerilya yang mengaku mewakili aspirasi-aspirasi golongan Melayu-Muslim,¹⁵ mulai menumpukan perhatian terhadap konflik di Selatan Thailand.

Pagi tanggal 4 Januari 1970-an merupakan tonggak bersejarah dalam sejarah

¹³Choirul Fuad Yusuf, dkk., *Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand* (Jakarta: Pusit Litbang dan Khazana Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), h. 387

¹⁴Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, h. 183

¹⁵*Ibid.*, h. 198

perjuangan PULO. Deringan suara tembakan dari berbagai jenis senjata api meletus di Markas Batalion Tentara Pileng Choh-erong di wilayah Naratiwat, yang merupakan suatu proklamasi pencetus revolusi bersenjata antara Pejuang Pembebasan Patani dengan rezim penjajah pemerintahan Thai. Salah satu pernyataan PULO secara sengaja mengutip Alquran yang menerangkan bahwa “tidak boleh hidup di bawah kekuasaan kafir (penyembah berhala); sebenarnya orang-orang yang menganggap kafir sebagai penguasanya tidak akan berhasil baik dunia ini maupun akhirat.”¹⁶

Kenyataannya, dalam serangan itu kekuatan PULO jauh lebih maju dan professional dari apa yang dianggap oleh penjajah Siam. Kehebatan dalam serangan tersebut tentu bukan tanpa alasan, mereka didukung oleh ribuan pemuda pemudi dan rakyat Patani ikut bergabung dalam Gerakan Pembebasan Patani PULO. Namun demikian, kegiatan-kegiatan yang paling menarik perhatian adalah serangan terhadap para pejabat pemerintah pusat-pusat komunikasi internasional dan fungsi-fungsi raja. Berita tentang operasi-operasi itu biasanya menimbulkan sensasi dan akan dikutip oleh kantor berita internasional. Selanjutnya, dalam kasus-kasus seperti itu, pemerintah pusat tidak punya pilihan lain selain membalas dengan tindakan militer yang lebih keras lagi, yang akan menimbulkan lebih banyak korban di kalangan penduduk yang tak berdosa.¹⁷

Pemberlakuan UU darurat perang oleh pemerintah Phibul pada tahun 1948 M telah menyita perhatian suasana internasional dalam dunia Islam pada umumnya juga merupakan sumber kekhawtiran bagi Bangkok. Sesungguhnya, dengan bangkitnya kesadaran Islam secara dramatis selama dasawarsa terakhir, yang lahir dari rasa percaya dan kesadaran akan pengaruh yang dimiliki, penderitaan minoritas Muslim di mana dibahas oleh berbagai organisasi termasuk Organisasi Konferensi Islam (*Organization of Islamic Conference*, -OIC), Konferensi para Menteri Luar Negeri Islam dan Konferensi Tingkat Tinggi Islam. Kasus kaum Muslim Moro di Mindanao Selatan (Filipina) merupakan suatu contoh yang baik tentang bagaimana persoalan minoritas samapi harus ditangani melalui penegahan pemerintah Libya.¹⁸

¹⁶ S. Yunanto, *Gerakan Militer Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2003), h. 203

¹⁷ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 186

¹⁸ *Ibid.*, h.201

PULO, menurut pengakuan pimpinannya sendiri, tidak berhasil memperoleh perhatian resmi dari berbagai badan internasional Islam, dimana pada waktu itu hadir pula perwakilan dari Malaysia dan Indonesia. Seperti dikatakan oleh sebuah artikel dalam *Impact London*:

Untuk bisa dicantumkan dalam agenda Organisasi Konperensi Islam dan Konperensi Para Menlu Islam, suatu persoalan harus diajukan secara formal oleh sebuah negara anggota. Siapa yang melakukannya? Bagaimana terbesar dari negara-negara (anggota) terlalu bermasah bodoh atau tidak tahu apa-apa. Orang-orang Malaysia, yang dalam pandangan negara-negara lainnya, tentunya mengetahui dan akan berkata demikian apabila ada suatu masalah yang perlu mendapat perhatian mereka, merasa bahwa berbuat demikian akan melanggar kode solidaritas ASEAN. Secara pribadi mereka akan menyatakan simpati dan bahkan kesedihan mereka yang mendalam, tapi secara resminya masalah itu tidak ada.

Yang tidak dapat dicapai secara resmi oleh PULO, dapat dicapainya dengan cara-cara lain. Barangkali upaya mereka yang paling akhir mengedarkan seruan mereka ketika dilangsungkan di KTT Islam di Mekkah dan (Saudi Arabia) dalam bulan Januari 1981 M.¹⁹ Dokumen itu berhasil dimuat dalam *The Journal of the Muslim World League* edisi April 1981 M dengan judul “Patani Minta Bantuan Muslim” persoalan ini telah menjadi pusat perhatian banyak kelompok Islam berikut cuplikan:

Sambil menelusuri kembali latabelakang sejarah golongan Muslim di Thai Selatan, ia (Tan Sri Abdul Aziz bin Aziz bin Zain, wakil presiden organisasi Kesejahteraan Malaysia) mengatakan, bahwa mereka itu dari ras Melayu dan menganut adat dan tradisi Melayu..... karena tragedi sejarah mereka terpisah dari sesama (Melayu) dan menjadi bagian dari apa yang sekarang merupakan kerajaan Thai. Semenjak itu, orang-orang Melayu di Selatan menaruh dendam kesumat berkenaan dengan apa yang mereka anggap sebagai penggabungan secara paksa tanah air mereka dengan negeri Thai yang Buddhis dann berbahasa Thai.selama lebih dari satu abad, pemerintah Thai berusaha untuk mengasimilasi warganya yang Melayu melalui kebijakan integrasi nasional yang mengharuskan setiap warga negara menempuh pendidikan Thai, mempunyai nama Thai dan berkebudayaan Thai. Upaya-upaya ini oleh orang-orang Muslim dianggap sebagai usaha untuk menindas identitas mereka, adat Melayu, agama dan kebudayaan Islam mereka. Ia menunjukkan bahwa orang-orang Melayu itu telah memberi reaksi dengan berbagai cara, mulai dari protes sampai kepada perjuangan bersenjata sejak 1832, telah terjadi serentetan pemberontakan yang

¹⁹*Ibid.*, h. 202

dapat di tumpas. Orang-orang Muslim itu tidak pernah berhenti berharap dan berjuang untuk membebaskan tanah air mereka dari dominasi Thai, apakah itu melalui pemisahan diri atau otonomi. Walaupun pemerintah Thai telah mengambil sejumlah tindakan untuk mengambil hati yang kongkrit untuk membantu golongan itu mengatasi kesenjangan ekonomi, sosial dan pendidikan antara orang-orang Muslim itu dan penguasa-penguasa mereka, pejabat-pejabat Thai, katanya.

Yang menarik dari tulisan atau artikel di atas adalah bahwa hal itu merupakan ringkasan dari pidato yang diucapkan oleh seorang pejabat tinggi agama dalam pemerintah Malaysia. Gambaran yang dilukiskannya sangat suram dan dimaksudkan untuk menimbulkan tanggapan emosional di kalangan umat Islam, baik dari negara-negara Arab maupun yang bukan Arab.

Penutup

Sejak kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah telah melahirkan suatu organisasi PULO yang di ketua Tengku Kota Bira Nila didirikan pada 22 Januari 1968 M berdirinya PULO ini untuk melawan radikalnya kebijakan pemerintah Thailand terhadap masyarakat Melayu Muslim Patani kebijakannya tersebut ingin menghapus identitas Melayu Muslim baik segi agama, budaya, dan bahasa, dan Melayu Muslim Patani disana di beri julkan *Kheak* yang artinya orang pendatang oleh pemerintah Thailand perbedaan tersebut memunculkan keinginan etnik Patani ingin mendirikan Patani Raya atau negeri yang ottonom.

DAFTAR REFERENSI

Ajid Thohir. *Studi Kawasan dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Choirul Fuad Yusuf, dkk. *Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand*. Jakarta: Pusit Litbang dan Khazana Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2012.
- Paulus Rudolf Yuniarto, “Minoritas Muslim Thailand Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 7, No. 1 tahun 2005.
- Saiful Muzani. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta:LP3ES, 1993.
- Surin Pitsuwan. *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Syabbuddin Mangandaralam. *Thailand Negara Gajah Putih*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Taufik Abdullah Sharon Shiddique. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Yunanto. *Gerakan Militer Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*. Jakarta: Fried Ebert Stiftung, 2003.